

**ANALISIS *FISCAL ILLUSION* PADA KINERJA KEUANGAN
DAERAH PEMERINTAH PROVINSI DI WILAYAH
SUMATERA BAGIAN SELATAN
TAHUN 2010-2020**



Skripsi Oleh

PUTRI ALISIA RENADA

01021281823051

EKONOMI PEMBANGUNAN

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS EKONOMI

2022

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS EKONOMI

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF

**ANALISIS *FISCAL ILLUSION* PADA KINERJA KEUANGAN DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI DI WILAYAH SUMATERA BAGIAN
SELATAN TAHUN 2010-2020**

Disusun oleh:

Nama : Putri Alisia Renada

NIM : 01021281823051

Fakultas : Ekonomi

Jurusan : Ekonomi Pembangunan

Bidang Kajian/Konsentrasi : Keuangan Daerah

Disetujui untuk digunakan dalam ujian komprehensif.

TANGGAL PERSETUJUAN

DOSEN PEMBIMBING

Tanggal: 23 Juli 2022



Ketua: Prof. Dr. H. Didik Susetyo, M.Si
NIP. 196007101987031003

Tanggal: 20 Agustus 2022



Anggota: Feny Marissa, S.E., M.Si
NIP. 199004072018032001

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

ANALISIS *FISCAL ILLUSION* PADA KINERJA KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI DI WILAYAH SUMATERA BAGIAN SELATAN TAHUN 2010-2020

Disusun oleh:

Nama : Putri Alisia Renada

NIM : 01021281823051

Fakultas : Ekonomi

Jurusan : Ekonomi Pembangunan

Bidang Kajian/Konsentrasi : Keuangan Daerah

Telah diuji dalam ujian komprehensif pada tanggal 12 Oktober 2022 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif
Indralaya, 12 Oktober 2022

Ketua

Anggota

Anggota

Prof. Dr. H. Didik Susetyo, M.Si
NIP.196007101987031003

Feny Marissa, S.E., M.Si
NIP.199004072018032001

Dr. Siti Rohima, S.E., M.Si
NIP. 196903142014092001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan

ASLI
JUR. EK. PEMBANGUNAN 14-11-2022
FAKULTAS EKONOMI UNSRI

Dr. Mukhlis, S.E., M.Si
NIP 197304062010121001

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Alisia Renada
NIM : 01021281823051
Jurusan : Ekonomi Pembangunan
Bidang Kajian/Konsentrasi : Keuangan Daerah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang berjudul: *Analisis Fiscal Illusion* Pada Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi di Wilayah Sumatera Bagian Selatan Tahun 2010-2020.

Pembimbing : Prof. Dr. H. Didik Susetyo, M.Si
Anggota : Feny Marissa, S.E., M.Si
Tanggal Ujian : 12 Oktober 2022

Adalah benar hasil karya sendiri. Dalam skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak disebutkan sumbernya.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila pernyataan saya ini tidak benar dikemudian hari, saya bersedia dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaaan.

Indralaya, 19 Oktober 2022
Pembuat Pernyataan,



ASLI
JUR. EK. PEMBANGUNAN 14-11-2022
FAKULTAS EKONOMI UNSRI

Putri Alisia Renada
NIM. 01021281823051

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT berkat Rahmat, Hidayah, dan Karunia-Nya, saya dapat menyelesaikan penelitian Skripsi dengan judul “*Analisis Fiscal Illusion Pada Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi di Wilayah Sumatera Bagian Selatan Tahun 2010-2020*”. Skripsi ini digunakan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat Sarjana Ekonomi program Strata Satu (S-1) Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Skripsi ini membahas Analisis *Fiscal Illusion* pada Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi di Wilayah Sumatera Bagian Selatan sehingga dapat mendukung kegiatan perekonomian suatu daerah. Selama penulisan dan penelitian skripsi ini tidak terlepas dari kendala dan hambatan. Akan tetapi, berkat bimbingan, bantuan dan saran yang diberikan oleh berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih belum sempurna. Dengan demikian, penulis mengharapkan saran dan kritik demi perbaikan di masa yang akan datang, serta diharapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembacanya.

Indralaya, 19 Oktober 2022



Putri Alisia Renada
NIM. 01021281823051

UCAPAN TERIMA KASIH

Selama penulisan dan penyusunan skripsi ini, penulis tidak luput dari berbagai kendala. Kendala tersebut dapat terselesaikan berkat bimbingan, dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang selalu memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada saya selaku hamba-Nya sehingga diberikan kemudahan dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.
2. Kedua orang tua saya, Bapak Benny dan Ibu Yanti dan saudara perempuan saya, Fanni Ramadhani yang telah memberikan doa dan dukungan selama perkuliahan dan proses penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. H. Didik Susetyo, M.Si dan Ibu Feny Marissa, S.E., M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing serta memberikan saran dalam proses penyelesaian skripsi ini.
4. Ibu Dr. Siti Rohima, S.E., M.Si selaku Dosen Penguji yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji saya serta telah membantu memberikan kritik, saran dan masukan untuk skripsi saya.
5. Bapak Dr. Sukanto, S.E., M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu meluangkan waktu dan memberikan semangat untuk saya ketika saya butuh bimbingan akademik selama menjalani proses perkuliahan.
6. Bapak Dr. Mukhlis, S.E., M.Si selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

7. Semua dosen di Jurusan Ekonomi Pembangunan yang telah bersedia memberikan pemahaman materi saat menjalani proses perkuliahan.
8. Teman-teman Jurusan Ekonomi Pembangunan Angkatan 2018 Kampus Indralaya dan teman-teman Konsentrasi Keuangan Daerah 2018 yang selalu memberi warna dalam proses perkuliahan saya.
9. Teman-teman seperjuangan selama masa perkuliahan yaitu Briansyah Hanratama, Amya Bunga Fathiyah, Wilda Widya Sari, dan Selvi Liskha Sari yang telah memberikan keceriaan, hiburan dan semangat dalam menjalani perkuliahan dan saat proses menyusun skripsi.
10. Rekan-rekan lainnya yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang telah memberikan dorongan untuk terus semangat menjalani perkuliahan.

Indralaya, 19 Oktober 2022



Putri Alisia Renada
NIM. 01021281823051

ABSTRAK

ANALISIS *FISCAL ILLUSION* PADA KINERJA KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI DI WILAYAH SUMATERA BAGIAN SELATAN TAHUN 2010-2020

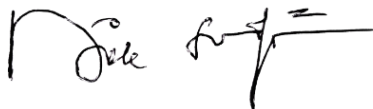
Oleh:

Putri Alisia Renada; Didik Susetyo; Feny Marissa

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan daerah dan fenomena *fiscal illusion* dalam pemerintah provinsi di Wilayah Sumatera Bagian Selatan. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder dari tahun 2010-2020. Metode analisis kinerja keuangan daerah diukur menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah, rasio derajat desentralisasi fiskal dan rasio ketergantungan keuangan daerah, sedangkan analisis deteksi ilusi fiskal dihitung dengan pendekatan pendapatan (*Revenue Enhancement*) dengan menggunakan regresi data panel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah memiliki nilai sebesar 75 persen yang terkategori tinggi dan memiliki pola hubungan delegatif, rasio derajat desentralisasi fiskal memiliki nilai sebesar 38 persen yang terkategori sedang, dan rasio ketergantungan keuangan daerah memiliki nilai sebesar 53 persen yang terkategori sangat baik. Variabel PDRB, DBH dan DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah, sedangkan retribusi daerah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap belanja daerah, dan terdapat ilusi fiskal di Wilayah Sumatera Bagian Selatan.

Kata Kunci: *Kinerja Keuangan Daerah, Deteksi Ilusi Fiskal*

Ketua




Prof. Dr. H. Didik Susetyo, M.Si
NIP. 196007101987031003

Anggota



Feny Marissa, S.E., M.Si
NIP. 199004072018032001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan



Dr. Mukhlis, S.E., M.Si
NIP. 197304062010121001

ABSTRACT

FISCAL ILLUSION ANALYSIS OF REGIONAL FINANCIAL PERFORMANCE OF PROVINCIAL GOVERNMENTS IN THE SOUTHERN SUMATERA REGION 2010-2020

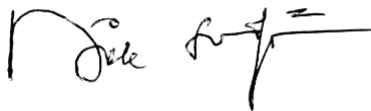
By:

Putri Alisia Renada; Didik Susetyo; Feny Marissa

The purpose of this research is determine and analyze regional financial performance and the phenomenon of fiscal illusion in the provincial government in the Southern Sumatera Region. The data used in this research is secondary data from 2010-2020. The regional financial performance analysis method by measuring the regional financial independence ratio, fiscal decentralization degree ratio, regional financial dependency ratio, while the analysis of fiscal illusion detection by measuring revenue enhancement using panel data regression. The results of this research indicate that the regional financial performance using the regional financial independence ratio has a value of 75 percent, which is categorized as high and has a delegative relationship pattern, fiscal decentralization degree ratio has a value of 38 percent, which is categorized as medium, and the regional financial dependency ratio has a value of 53 percent, which is categorized as very good. The variables gross regional domestic product, revenue sharing fund and general allocation fund have a positive and significant effect on local expenditure, while retributions have a negative and insignificant effect on local expenditure, and there is a fiscal illusion in the Southern Sumatera Region.

Keyword: *Regional Financial Performance, Fiscal Illusion*

First Advisor



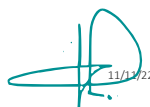
Prof. Dr. H. Didik Susetyo, M.Si
NIP. 196007101987031003

Member



Feny Marissa, S.E., M.Si
NIP. 199004072018032001

Acknowledge by,
Head of Development Economics Department



Dr. Mukhlis, S.E., M.Si
NIP. 197304062010121001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Putri Alisia Renada
NIM : 01021281823051
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 31 Mei 2000
Alamat : Jl. Putri Kembang Dadar RT.52
RW.16 No.86B Kel. Bukit Lama
Kec. Ilir Barat 1 Kota Palembang
Sumatera Selatan

No. *Handphone* : 089616185851

Agama : Islam

Jenis Kelamin : Perempuan

Status : Belum Menikah

Tinggi : 160 cm

Berat Badan : 45 kg

Email : putrialisia31@gmail.com

Riwayat Pendidikan

- 2006-2012 : SD Negeri 103 Palembang
- 2012-2015 : SMP Negeri 18 Palembang
- 2015-2018 : SMK Negeri 3 Palembang
- 2018-2022 : Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi,
Universitas Sriwijaya

Pengalaman Organisasi

- Staff Muda BEM KM FE UNSRI 2018-2019
- Anggota Unsri Mengajar 2018-2019

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH	iii
KATA PENGANTAR	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	14
1.3 Tujuan Penelitian	14
1.4 Manfaat Penelitian	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
2.1 Landasan Teori	16
2.1.1 Teori Federalisme Fiskal (<i>Fiscal Federalism Theory</i>)	16
2.1.2 Teori Pengeluaran Pemerintah	17

2.1.3	Desentralisasi Fiskal (<i>Fiscal Decentralization</i>)	19
2.1.4	Otonomi Daerah (<i>Regional Autonomy</i>)	20
2.1.5	Kinerja Keuangan Daerah	20
2.1.6	Belanja Daerah	26
2.1.7	Retribusi Daerah	27
2.1.8	Produk Domestik Regional Bruto	29
2.1.9	Dana Perimbangan	30
2.1.10	Deteksi Ilusi Fiskal	31
2.2	Penelitian Terdahulu	33
2.3	Kerangka Pikir	36
2.4	Hipotesis Penelitian	40
BAB III METODOLOGI PENELITIAN		42
3.1	Ruang Lingkup Penelitian.....	42
3.2	Jenis dan Sumber Data.....	42
3.3	Metode Pengumpulan Data	42
3.4	Teknik Analisis	43
3.4.1	Analisis Kinerja Keuangan Daerah	43
3.4.2	Analisis Regresi Data Panel	44
3.4.2.1	Penentuan Model Estimasi Regresi Data Panel	45
3.4.2.2	Pemilihan Model	46
3.4.2.3	Uji Asumsi Klasik	48
3.4.2.4	Pengujian Hipotesis.....	51
3.4.3	Analisis Deteksi Ilusi Fiskal	53

3.5	Definisi Variabel	54
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		56
4.1	Hasil Penelitian	56
4.1.1	Gambaran Umum Penelitian	56
4.1.2	Perkembangan Belanja Daerah di Wilayah Sumatera Bagian Selatan .	57
4.1.3	Perkembangan PDRB di Wilayah Sumatera Bagian Selatan	60
4.1.4	Perkembangan Retribusi Daerah di Wilayah Sumatera Bagian Selatan	62
4.1.5	Perkembangan Dana Bagi Hasil di Wilayah Sumatera Bagian Selatan	66
4.1.6	Perkembangan Dana Alokasi Umum di Wilayah Sumatera Bagian Selatan	69
4.2	Pembahasan	72
4.2.1	Analisis Kinerja Keuangan Daerah di Wilayah Sumatera Bagian Selatan	72
4.2.1.1	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	72
4.2.1.2	Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal	75
4.2.1.3	Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah	78
4.2.2	Pengaruh PDRB, Retribusi Daerah, DBH, dan DAU Terhadap Belanja Daerah	80
4.2.2.1	Uji Pemilihan Model	82
4.2.2.2	Hasil Intersep di Wilayah Sumatera Bagian Selatan	84
4.2.2.3	Uji Asumsi Klasik	86
4.2.2.4	Uji Hipotesis	87
4.2.3	Analisis Deteksi Ilusi Fiskal di Wilayah Sumatera Bagian Selatan	93

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	96
5.1 Kesimpulan	96
5.2 Saran	97
DAFTAR PUSTAKA	99
LAMPIRAN	105

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Kriteria Penilaian Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	23
Tabel 2.2 Kriteria Penilaian Tingkat Derajat Desentralisasi Fiskal	25
Tabel 2.3 Kriteria Penilaian Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah	25
Tabel 4.1 Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah di Wilayah Sumatera Bagian Selatan Tahun 2010-2020	73
Tabel 4.2 Perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal di Wilayah Sumatera Bagian Selatan Tahun 2010-2020	76
Tabel 4.3 Perhitungan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah di Wilayah Sumatera Bagian Selatan Tahun 2010-2020	78
Tabel 4.4 Hasil Regresi Data Panel dengan Common Effect Model, Fixed Effect Model dan Random Effect Model	81
Tabel 4.5 Uji Chow	82
Tabel 4.6 Uji Hausman	83
Tabel 4.7 Hasil Regresi Metode Fixed Effect Model	83
Tabel 4.8 Hasil Intersep di Wilayah Sumatera Bagian Selatan	85
Tabel 4.9 Uji Multikolinearitas	86
Tabel 4.10 Uji Heteroskedastisitas	87
Tabel 4.11 Uji F	88
Tabel 4.12 Uji t	88
Tabel 4.13 Uji Koefisien Determinasi (R^2)	92
Tabel 4.14 Deteksi Ilusi Fiskal	93

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1	Perkembangan Dana Alokasi Umum di Wilayah Sumatera Bagian Selatan Tahun 2018-20207
Gambar 1.2	Perkembangan Dana Bagi Hasil di Wilayah Sumatera Bagian Selatan Tahun 2018-20208
Gambar 1.3	Perkembangan Retribusi Daerah di Wilayah Sumatera Bagian Selatan Tahun 2018-20209
Gambar 1.4	Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto di Wilayah Sumatera Bagian Selatan Tahun 2018-2020 11
Gambar 1.5	Perkembangan Belanja Daerah di Wilayah Sumatera Bagian Selatan Tahun 2018-2020 11
Gambar 1.6	Perkembangan Pendapatan Asli Daerah di Wilayah Sumatera Bagian Selatan Tahun 2018-2020 12
Gambar 2.1	Perbedaan Kurva Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Menurut Teori Wagner, Solow, dan Musgrave dengan Teori Peacock dan Wiseman 18
Gambar 2.2	Skema Kerangka Pikir40
Gambar 4.1	Peta Sumatera Bagian Selatan56
Gambar 4.2	Perkembangan Belanja Daerah di Wilayah Sumatera Bagian Selatan Tahun 2010-202258
Gambar 4.3	Pertumbuhan Rata-Rata Belanja Daerah di Wilayah Sumatera Bagian Selatan Tahun 2010-202059
Gambar 4.4	Perkembangan PDRB di Wilayah Sumatera Bagian Selatan Tahun 2010-202061
Gambar 4.5	Pertumbuhan Rata-Rata PDRB di Wilayah Sumatera Bagian Selatan Tahun 2010-202062
Gambar 4.6	Perkembangan Retribusi Daerah di Wilayah Sumatera Bagian Selatan Tahun 2010-202063

Gambar 4.7	Pertumbuhan Rata-Rata Retribusi Daerah di Wilayah Sumatera Bagian Selatan Tahun 2010-2020	65
Gambar 4.8	Perkembangan Dana Bagi Hasil di Wilayah Sumatera Bagian Selatan Tahun 2010-2020	67
Gambar 4.9	Pertumbuhan Rata-Rata Dana Bagi Hasil di Wilayah Sumatera Bagian Selatan Tahun 2010-2020	68
Gambar 4.10	Perkembangan Dana Alokasi Umum di Wilayah Sumatera Bagian Selatan Tahun 2010-2020	69
Gambar 4.11	Pertumbuhan Rata-Rata Dana Alokasi Umum di Wilayah Sumatera Bagian Selatan Tahun 2010-2020	71

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1	Data Variabel Deteksi Ilusi Fiskal 105
Lampiran 2	Data Variabel Kinerja Keuangan Daerah 107
Lampiran 3	Hasil Perhitungan Kinerja Keuangan Daerah 110
Lampiran 4	Hasil Estimasi Pendekatan Common Effect Model (CEM) 112
Lampiran 5	Hasil Estimasi Pendekatan Fixed Effect Model (FEM) 113
Lampiran 6	Hasil Estimasi Pendekatan Random Effect Model (REM) 114
Lampiran 7	Hasil Uji Chow 115
Lampiran 8	Hasil Uji Hausman 116
Lampiran 9	Hasil Uji Multikolinearitas 117
Lampiran 10	Hasil Uji Heteroskedastisitas 117
Lampiran 11	Hasil Intersep 118

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemampuan suatu daerah untuk menjalankan otonomi daerah dapat ditinjau dengan melihat kinerja keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Dalam menilai sebuah kinerja dapat dikatakan seperti indikator keuangan ataupun non keuangan dari sebuah pekerjaan yang dilakukan untuk mencapai tujuan suatu organisasi.

Penilaian kinerja ini dilakukan pemerintah daerah melalui pengawasan terhadap aspek hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, keterkaitan keanekaragaman daerah dan potensi suatu daerah serta adanya tantangan persaingan dunia dan peluang untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah (Kolinug *et al.* 2019).

Hal ini dilakukan untuk memberikan kekuasaan maksimal kepada pemerintah daerah dan erat kaitannya dengan pemberian kewajiban dan hak dalam pelaksanaan otonomi daerah dalam rangka penyatuan sistem pemerintahan suatu negara (Kolinug *et al.* 2019). Otonomi ialah hak, kekuasaan, dan kewajiban daerah dalam mengatur dan mengelola daerahnya sesuai peraturan perundang-undangan. Indonesia selama ini telah menerapkan otonomi daerah yang merupakan wujud dari pelaksanaan desentralisasi (Dude *et al.* 2014).

Otonomi daerah atau desentralisasi yakni hak, kekuasaan, dan kewajiban suatu daerah dalam mengatur dan menguasai segala kegiatan pemerintahan dan kebutuhan masyarakatnya yang sesuai menurut undang-undang, yang melalui

pengaturan, pengalokasian, dan penggunaan sumber daya nasional, partisipasi masyarakat, perbandingan keuangan daerah dan pusat yang seimbang dan demokratis, mengawasi potensi dan keragaman lokal, serta pemerataan keadilan. Adapun tujuan pelaksanaan otonomi daerah yakni untuk menumbuhkan kesejahteraan rakyat, kesetaraan dan keadilan sosial (Pradnyana & Erawati, 2016).

Desentralisasi didefinisikan dalam tiga perspektif. Pertama, dimaknai seperti penyerahan langsung tanggung jawab pusat kepada daerah, yang diartikan seperti penyerahan daerah sebagai praktisi dan menentukan administratif dengan pengarahan dari pusat. Kedua, yakni seperti delegasi yang menangani keadaan di mana daerah bekerja untuk pemerintah pusat. Ketiga, sebagai desentralisasi, penyerahan kekuasaan guna menentukan sesuatu di daerah (Simarmata, 2018).

Melalui otonomi, daerah diharapkan dapat berdaya saing dengan tetap menjunjung tinggi prinsip demokrasi, kesetaraan, keadilan, kelebihan dan keunikan, serta potensi lokal. Akibatnya, pemerintah berperan sangat penting dalam penyediaan layanan publik untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Maka dari itu diperlukan sistem pengamatan, penilaian, dan pengukuran kinerja yang digunakan dalam mengukur perkembangan pemerintah daerah.

Kinerja keuangan ialah ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Pengukuran kinerja ialah metode yang dipakai untuk mengevaluasi dan mencatat pencapaian pelaksanaan kegiatan menurut sasaran, strategi dan tujuan untuk mengetahui perkembangan organisasi dan untuk menentukan kualitas dalam menetapkan dan akuntabilitas yang dapat ditingkatkan (Mahsun, 2012).

Pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai media monitoring dan penilaian suatu organisasi. Adanya respons yang diberikan oleh pengukuran kinerja, maka adanya upaya perbaikan terus-menerus yang dilakukan untuk memenuhi tujuan di masa depan (Bastian, 2006). Dalam mengelola keuangan daerah, perlu menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah salah satunya yaitu dengan menganalisis keuangan terhadap APBD yang telah ditentukan dan dilakukan (Surastowo, 2019).

APBD ialah singkatan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah yakni agenda kerja pemerintah daerah yang berisikan seluruh anggaran pengeluaran dan pendapatan pemerintah daerah untuk menggapai pembangunan baik provinsi, kota dan kabupaten yang dinyatakan dalam satuan mata uang dalam waktu satu tahun yang disetujui DPRD. Hal itu menjadi hukum dalam aturan yang disebut peraturan daerah dan pada dasarnya APBD sesuai dengan tugas dan tujuan APBN, hanya ruang lingkungannya saja yang berbeda (Machmud *et al.* 2014).

Sebagai pembanding dari unsur laporan pelaksanaan anggaran maka kinerja keuangan dapat diukur menggunakan indikator rasio keuangan. Indikator keuangan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu rasio kemandirian keuangan daerah, rasio derajat desentralisasi fiskal, dan rasio ketergantungan keuangan daerah. Keuangan daerah terus didukung oleh pemerintah pusat dengan memberi bantuan berupa dana perimbangan termasuk dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus yang mencakup sumber daya serta penerimaan pajak. Dana perimbangan ialah dana pendapatan dan pengeluaran yang diterima dari bantuan dana anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang diberikan untuk suatu wilayah guna

mencukupi permintaan daerah tersebut untuk menjalankan desentralisasi. Tujuan diberikannya dana ini yaitu untuk menolong suatu daerah dalam mendanai pembangunannya (Pratami & Dwirandra, 2017).

Semua daerah mempunyai pendapatan tersendiri dari wilayahnya yakni pendapatan asli daerah yang memiliki sudut pandang dalam kemajuan realisasi otonomi daerah. Tetapi, sering terjadi adanya indikasi ilusi fiskal (*Fiscal Illusion*) dikarenakan pemerintah daerah menerima bantuan dana perimbangan lebih besar atau lebih mendominasi daripada nilai pendapatan asli daerah yang dihasilkan oleh daerah tersebut (Gunanto & Afifah, 2021).

Amilcare Puviani adalah orang yang pertama kali mengemukakan teori ilusi fiskal. Ilusi fiskal digambarkan terjadi pada saat pihak yang memiliki kewenangan membuat keputusan dalam suatu institusi atau lembaga yang membuat ilusi atau rekayasa dalam penyusunan keuangan, sehingga dapat menjeruskan pihak lain dalam menilai dan mengambil tindakan tertentu (Dyahningtyas *et al.*, 2019). Menurut Ndadari dan Adi (2008), terdapat bukti adanya respons asimetris terhadap bantuan, dalam bentuk bantuan seperti dana transfer yang berguna untuk meningkatkan belanja daerah yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Ndadari dan Adi (2008) menyatakan bahwa adanya dana transfer dari pemerintah pusat akan mempengaruhi tingkat pengeluaran pemerintah kabupaten atau kota dan jika pemerintah daerah menerima dana transfer dari pemerintah pusat, dana tersebut akan digunakan tanpa adanya upaya peningkatan PAD di masing-masing daerah. Menurut Adi dan Ekaristi (2009), ilusi fiskal dapat diukur dengan

dua cara yakni dengan pengukuran pendapatan (*Revenue Enhancement*) dan manipulasi belanja (*Expenditure Manipulation*).

Asumsi yang didasarkan pada pengukuran pendapatan (*Revenue Enhancement*) yakni bahwa unsur penerimaan berhubungan positif dengan belanja. Menurut Adi dan Ekaristi (2009) belanja daerah pada hakikatnya adalah fungsi dari pendapatan daerah. Belanja yakni variabel dependen dan besarnya tergantung menurut sumber pendanaan daerah, pendanaan tersebut dapat berasal dari pendapatan sendiri ataupun transfer dari pemerintah pusat. Maka, apabila adanya hubungan yang negatif antara pendapatan dan belanja pada saat pengukurannya, maka terjadi ilusi fiskal.

Sementara, jika diukur menggunakan manipulasi belanja (*Expenditure Manipulation*), ilusi fiskal dapat dideteksi dengan mempertimbangkan fungsi setiap faktor penerimaan terhadap pertumbuhan anggaran. Unsur pengeluaran belanja dicurangi atau dimanipulasi agar asumsinya tetap sama (*Ceteris Paribus*) sesuai dengan tingkat pendapatan daerah itu sendiri. Jadi, semakin tinggi pendapatan daerah, seharusnya semakin tinggi juga pendapatan asli daerah (PAD) (Dude *et al.* 2014).

Secara garis besar, ilusi fiskal terjadi ketika pemerintah daerah merespons belanja daerah lebih banyak menggunakan dana perimbangan dibandingkan pendapatan asli daerah (PAD). Akibatnya, terdapat beberapa komponen dana perimbangan yang digunakan dalam penelitian ini yakni dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH), sementara retribusi daerah merupakan komponen

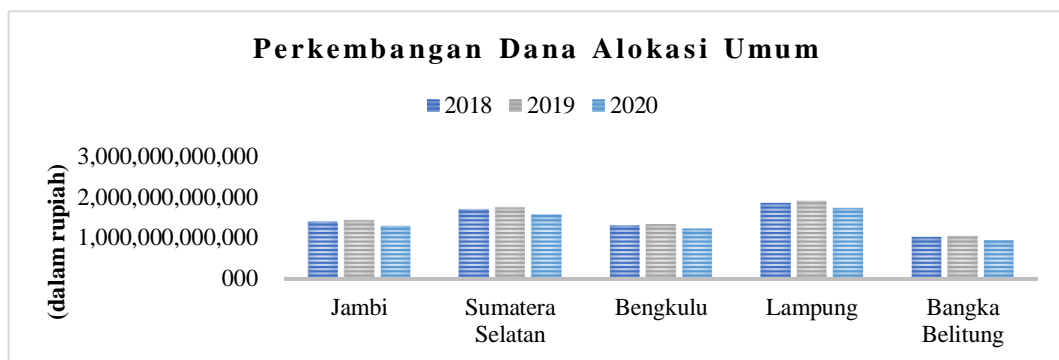
pendapatan asli daerah (PAD) yang diperoleh dari lima provinsi yang ada di Sumatera Bagian Selatan.

Sumatera Bagian Selatan di awal pembentukannya memiliki wilayah kekuasaan yang terdiri dari lima wilayah yakni, Provinsi Lampung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Bengkulu, Provinsi Jambi, dan Provinsi Sumatera Selatan. Seiring berjalannya waktu kelima wilayah tersebut membentuk provinsi tersendiri. Sumatera Bagian Selatan ini memiliki kekayaan dan sumber daya alam yang memadai dan memiliki lokasi strategis sehingga perekonomiannya tumbuh sangat pesat. Setelah berpisah dan mendirikan provinsi masing-masing, kelima provinsi di Wilayah Sumatera Bagian Selatan ini harus melaksanakan otonomi daerahnya masing-masing. Dalam menghitung deteksi ilusi fiskal terdapat beberapa komponen dari dana perimbangan dan pendapatan asli daerah.

Komponen pertama dari dana perimbangan adalah dana alokasi umum (DAU). DAU dapat digambarkan sebagai bantuan dana transfer atau dana perimbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka mengatasi kemampuan keuangannya untuk mengurangi kesenjangan fiskal di banyak daerah, namun tetap memperhatikan kebutuhan dan potensi daerah (Swandewi, 2014). Menurut Junaidi (2012) menjelaskan bahwa belanja pemerintah daerah di Indonesia, secara empiris terbukti jika bereaksi berlebihan terhadap peningkatan DAU dibandingkan dengan peningkatan PAD khususnya dari pajak daerah.

Sebagai penerima DAU, Pemerintah daerah memberikan reaksi secara asimetris terhadap kenaikan nilai DAU yang diterimanya, jika DAU meningkat dibandingkan

tahun-tahun sebelumnya, maka pemerintah daerah didorong untuk menggunakan belanja daerah lebih tinggi dari peningkatan DAU. Hal ini selaras dengan penelitian Anggraeni & Suhardjo (2010) dan Masdjojo & Sukartono (2009) bahwa kenaikan DAU diikuti oleh peningkatan yang lebih tinggi atau signifikan pada belanja daerah. Perkembangan dana alokasi umum di Wilayah Sumatera Bagian Selatan dalam tiga tahun terakhir dapat dilihat pada Gambar 1.1:

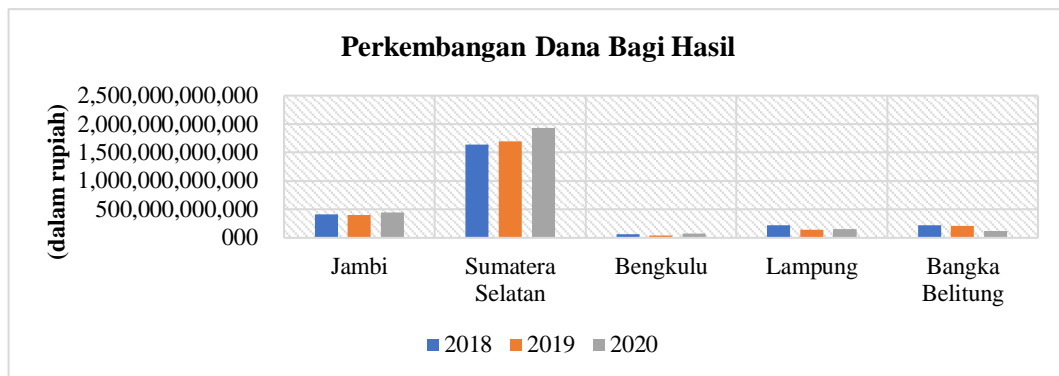


Sumber: BPS (2020), *diolah*

Gambar 1.1 Perkembangan Dana Alokasi Umum di Wilayah Sumatera Bagian Selatan Tahun 2018-2020

Gambar 1.1 menjelaskan keadaan dana alokasi umum pada tiga tahun terakhir di Wilayah Sumatera Bagian Selatan yang mengalami perkembangan yang fluktuatif dimana pada tahun 2020 semua provinsi yang berada di Wilayah Sumatera Bagian Selatan mengalami penurunan. Penurunan paling tinggi berada di tiga provinsi yaitu Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bangka Belitung yang turun sebesar 10 persen di tahun 2020 dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia, sehingga terjadi penurunan di berbagai sektor ekonomi yang mengalami dampaknya.

Berbeda dengan DAU, komponen berikutnya adalah dana bagi hasil (DBH). Menurut Mulyati & Yusriadi (2017) menyebutkan bahwa DBH ialah salah satu modal dan sumber penerimaan daerah yang cukup potensial bagi pemerintah daerah dalam mencukupi belanja daerah dan menghimpun dana pembangunan selain yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK). Selaras dengan penelitian Anggraeni & Suhardjo (2010), menyatakan bahwa DBH berpengaruh positif secara simultan dan parsial terhadap belanja daerah. Perkembangan dana bagi hasil di Wilayah Sumatera Bagian Selatan dalam tiga tahun terakhir dapat dilihat pada Gambar 1.2:



Sumber: BPS (2020), *diolah*

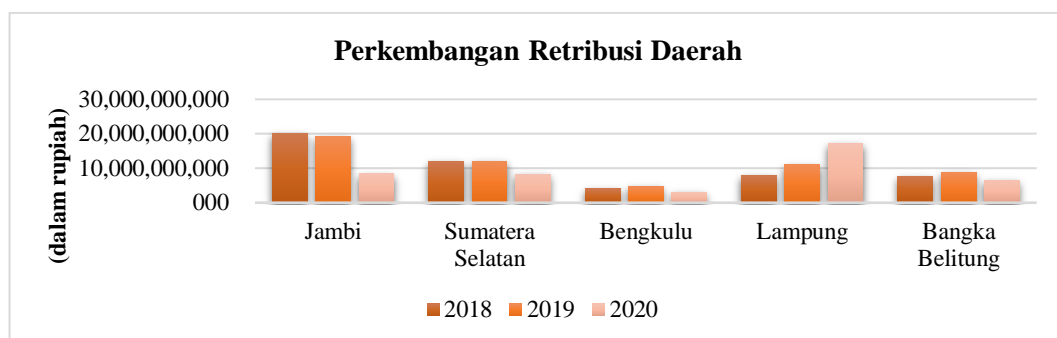
Gambar 1.2 Perkembangan Dana Bagi Hasil di Wilayah Sumatera Bagian Selatan Tahun 2018-2020

Pada Gambar 1.2, perkembangan dana bagi hasil di Wilayah Sumatera Bagian Selatan sama seperti dana alokasi umum yang mengalami penurunan yang fluktuatif. Provinsi Sumatera Selatan adalah provinsi yang banyak disokong oleh dana bagi hasil (dana transfer pemerintah), sedangkan provinsi yang paling sedikit disokong oleh dana bagi hasil yakni Provinsi Bengkulu. Penurunan paling tinggi terjadi di Provinsi Bengkulu sebesar 30,3 persen dan Provinsi Lampung sebesar 35

persen pada tahun 2019, sedangkan pada tahun 2020 terjadi di Provinsi Bangka Belitung sebesar 42,7 persen.

Komponen selanjutnya berasal dari PAD yakni retribusi daerah. Retribusi daerah ialah pungutan yang diambil di suatu daerah yang digunakan untuk membayar jasa ataupun memberikan persetujuan/izin tertentu, dan dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang khusus guna keperluan orang pribadi dan badan usaha/pengusaha (Asih & Irawan, 2018). Retribusi daerah dan pajak daerah memiliki karakteristik yang hampir sama sebagai sumber pendapatan daerah.

Menurut teori Peacock dan Wiseman, menyatakan bahwa adanya hubungan antara total retribusi daerah dengan pengeluaran. Pada kenyataannya retribusi daerah memiliki hubungan positif dengan belanja daerah, jika retribusi daerah mengalami kenaikan, maka belanja daerah juga akan mengalami kenaikan. Disisi lain, jika retribusi daerah menurun maka belanja daerah juga akan menurun (Mardiasmo, 2002). Perkembangan retribusi daerah di Wilayah Sumatera Bagian Selatan dalam tiga tahun terakhir dapat dilihat pada Gambar 1.3:



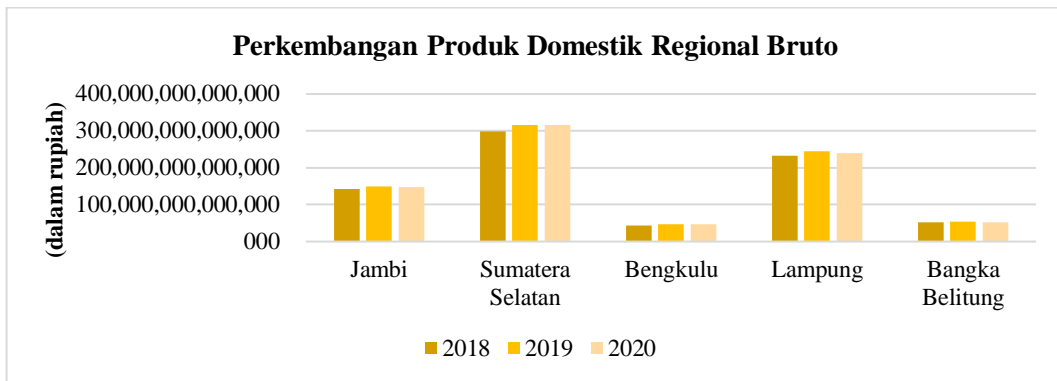
Sumber: BPS (2020), *diolah*

Gambar 1.3 Perkembangan Retribusi Daerah di Wilayah Sumatera Bagian Selatan Tahun 2018-2020

Pada Gambar 1.3, perkembangan retribusi daerah di Wilayah Sumatera Bagian Selatan rata-rata mengalami penurunan setiap tahunnya, tetapi Provinsi Lampung mengalami peningkatan dalam tiga tahun terakhir sebesar 54,3 persen pada tahun 2020. Penurunan tertinggi terjadi pada tahun 2020 di Provinsi Bangka Belitung sebesar 25,4 persen, Provinsi Sumatera Selatan sebesar 31,4 persen, Provinsi Bengkulu sebesar 35,5 persen dan Provinsi Jambi sebesar 56,3 persen.

Disamping itu, juga terdapat pertumbuhan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan produk domestik regional bruto (PDRB) secara berkesinambungan. Peningkatan atau penurunan PDRB suatu daerah dapat menunjukkan peningkatan atau penurunan proses produksi barang dan jasa yang dihasilkan di suatu wilayah tertentu (Rahman *et al.* 2016). Hal ini akan memungkinkan suatu daerah untuk menggunakan berbagai potensi daerah lebih efisien dalam mengutamakan pelayanan publik.

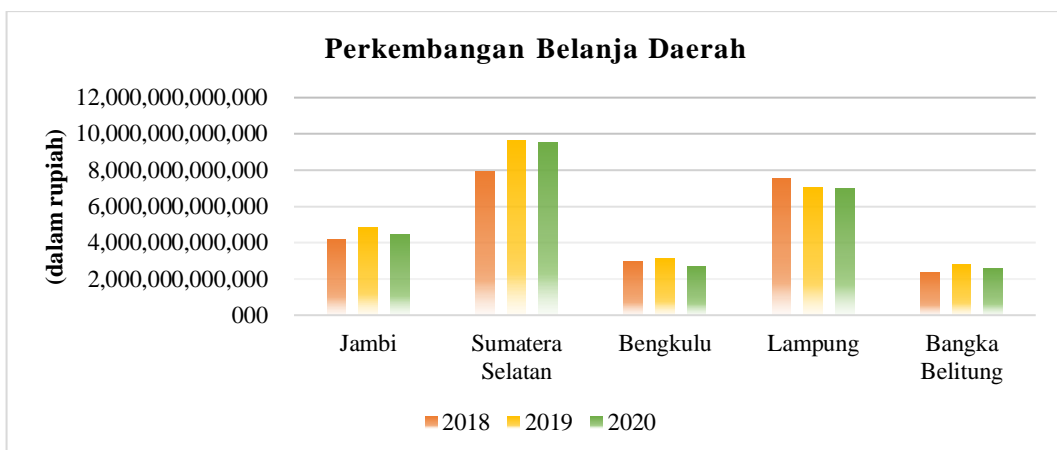
Secara teori, semakin tinggi PDRB, maka semakin tinggi pula pendapatan daerah. Semakin tinggi pendapatan daerah, maka semakin tinggi pula alokasi pengeluaran atau belanja oleh pemerintah pusat. Hal ini berdampak pada peningkatan kepentingan pelayanan umum dan peningkatan potensi daerah yang berbeda-beda (Mardiasmo, 2002). Perkembangan produk domestik regional bruto di Wilayah Sumatera Bagian Selatan dalam tiga tahun terakhir dapat dilihat pada Gambar 1.4:



Sumber: BPS (2020), *diolah*

Gambar 1.4 Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto di Wilayah Sumatera Bagian Selatan Tahun 2018-2020

Perkembangan PDRB pada Gambar 1.4 mengalami penurunan yang fluktuatif. Pada tahun 2020 terjadi penurunan yang cukup tinggi di dua provinsi yakni Provinsi Lampung sebesar 1,7 persen dan Provinsi Bangka Belitung sebesar 2,3 persen. Kelima variabel tersebut dapat diukur untuk mendeteksi ilusi fiskal di daerah Sumatera Bagian Selatan. Berikut ini perkembangan belanja daerah di Wilayah Sumatera Bagian Selatan dalam tiga tahun terakhir dapat dilihat pada Gambar 1.5:

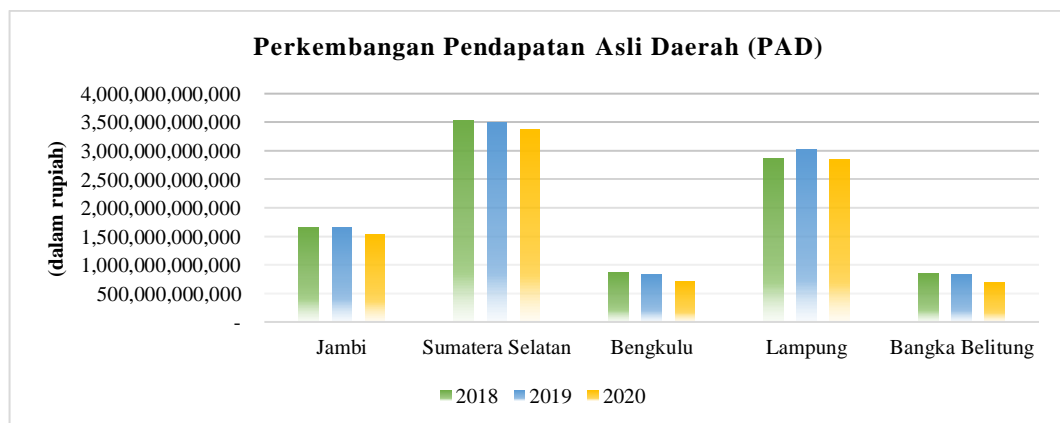


Sumber: BPS (2020), *diolah*

Gambar 1.5 Perkembangan Belanja Daerah di Wilayah Sumatera Bagian Selatan Tahun 2018-2020

Gambar 1.5 menjelaskan mengenai perkembangan belanja daerah di Wilayah Sumatera Bagian Selatan dari tahun 2018-2020 mengalami perkembangan yang fluktuatif. Sumatera Selatan ternyata mempunyai nilai belanja daerah paling tinggi diantara provinsi yang lain. Hal ini dikarenakan provinsi yang telah lama berdiri, sedangkan provinsi yang mempunyai nilai belanja daerah yang paling rendah adalah Provinsi Bangka Belitung.

Kelima provinsi ini rata-rata mengalami penurunan dalam tiga tahun terakhir ini. Namun, pada tahun 2020 ada tiga provinsi yang mengalami penurunan yang cukup signifikan yakni Provinsi Bengkulu, Provinsi Jambi dan Provinsi Bangka Belitung. Bengkulu turun sebesar 13,5 persen dari tahun 2019, Jambi turun 8,2 persen dari tahun 2019 dan Bangka Belitung turun sebesar 7,2 persen dari tahun 2019. Penurunan yang terjadi di ketiga provinsi ini dikarenakan terjadinya pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia, sehingga berbagai sektor mengalami dampaknya. Perkembangan pendapatan asli daerah (PAD) di Wilayah Sumatera Bagian Selatan dalam tiga tahun terakhir dapat dilihat pada Gambar 1.6:



Sumber: BPS (2020), *diolah*

Gambar 1.6 Perkembangan Pendapatan Asli Daerah di Wilayah Sumatera Bagian Selatan Tahun 2018-2020

Pada Gambar 1.6 menjelaskan pada setiap tahunnya, provinsi di Wilayah Sumatera Bagian Selatan mengalami penurunan PAD. Hal ini menandakan bahwa terdapat daerah yang mengalami kinerja yang menurun dalam pengumpulan pendapatan asli daerah (PAD). Hal ini terlihat dari penurunan nilai PAD selama 3 tahun terakhir. Penurunan tertinggi terjadi pada tahun 2020 di Bangka Belitung yang turun sebesar 17,4 persen, Bengkulu sebesar 13,8 persen dan Jambi sebesar 7 persen.

Pada tahun 2018 sampai dengan 2020 tingkat penurunan PAD lebih besar daripada tingkat penurunan belanja daerah. Secara teori, hubungan yang sehat itu dimana PAD meningkat, belanja daerah juga meningkat. Sebaliknya, jika PAD menurun maka belanja daerah juga ikut menurun. Terlihat pada gambar 1.5 dan 1.6 jika nilai PAD yang menurun, tetapi nilai belanja daerah tetap meningkat. Hal ini menandakan adanya hubungan yang asimetris antara PAD dan belanja daerah. Melihat PAD yang menurun, secara otomatis mempengaruhi pemerintah daerah untuk menggunakan lebih banyak dana perimbangan ketimbang pendapatan asli daerah untuk mendukung belanja daerah di Wilayah Sumatera Bagian Selatan.

Pernyataan tersebut sesuai dengan penelitian Ilmiyyah *et al.* (2020) yang menyatakan bahwa terdapat ilusi fiskal yang terdeteksi di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan di periode 2012-2018 melalui pendekatan manipulasi belanja. Selain itu, hasilnya juga menunjukkan bahwa semua variabel dalam pendekatan manipulasi belanja mempengaruhi dan mampu menjelaskan adanya ilusi fiskal.

Sesuai dengan penjelasan tersebut, maka untuk mengindikasikan sikap bertentangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap pemberian dana

transfer atau dana perimbangan yang telah dianggarkan pemerintah pusat, hal ini berdampak pada upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui belanja sebagai suatu hipotesis yang memerlukan bukti empiris. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengkaji tentang *Fiscal Illusion*, yang berjudul “Analisis *Fiscal Illusion* Pada Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi di Wilayah Sumatera Bagian Selatan Tahun 2010-2020”.

1.2 Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana kinerja keuangan daerah pemerintah provinsi di Wilayah Sumatera Bagian Selatan?
- 2) Bagaimana pengaruh produk domestik regional bruto (PDRB), retribusi daerah, dana bagi hasil (DBH), dan dana alokasi umum (DAU) terhadap belanja daerah?
- 3) Apakah terjadi indikasi *fiscal illusion* dalam suatu kinerja keuangan daerah pemerintah provinsi di Wilayah Sumatera Bagian Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1) Mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan daerah pemerintah provinsi di Wilayah Sumatera Bagian Selatan.
- 2) Mengetahui dan menganalisis pengaruh produk domestik regional bruto (PDRB), retribusi daerah, dana bagi hasil (DBH), dan dana alokasi umum (DAU) terhadap belanja daerah.

- 3) Mengetahui dan menganalisis indikasi terjadinya *fiscal illusion* dalam suatu kinerja keuangan daerah pemerintah provinsi di Wilayah Sumatera Bagian Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Akademis

Penelitian ini memberikan beberapa manfaat, yakni:

1. Berfungsi dalam meningkatkan pengetahuan dan pengembangan ilmu pengetahuan dalam ilmu ekonomi yang mengelola keuangan daerah, khususnya mengenai teori-teori tentang *fiscal illusion*.
2. Berguna untuk menambah wawasan jika terjadi indikasi *fiscal illusion* pada kinerja keuangan daerah di daerah yang diteliti.
3. Menambah referensi di lingkungan akademis.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan beberapa manfaat, yakni:

1. Berguna memberikan masukan berupa informasi untuk pemerintah daerah dalam mengatur keterkaitan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat khususnya dalam memberikan bantuan dana transfer.
2. Berguna untuk menjadi bahan pembelajaran dalam ilmu ekonomi.
3. Menjadi sebuah referensi yang bermanfaat bagi peneliti selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, P. H., & Ekaristi, P. D. (2009). Fenomena Ilusi Fiskal Dalam Kinerja Anggaran Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 6(1), 1–19. <https://doi.org/10.21002/jaki.2009.01>
- Ajija, S. R., Sari, D. W., Setianto, R. H., & Primanti, M. R. (2011). *Cara Cerdas Menguasai Eviews*. Salemba Empat.
- Amalia, W. R. (2018). Fiscal Illusion and Budget Performance : Evidence from Indonesia. *International Conference On Management Economics and Social Sciences*, 52–59.
- Andriyani, A., & Siregar, B. (2013). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 7(2), 101–115.
- Anggraeni, U. D., & Suhardjo, Y. (2010). Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. *SOLUSI*, 9(1), 69–81.
- Asih, S., & Irawan. (2018). Pengaruh Kontribusi Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Bagi Hasil Pajak Terhadap Belanja Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating Pemerintah Kabupaten Dan Kota. *Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik*, 9(1), 177–191.
- Bastian, I. (2006). *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar*. Erlangga.
- BPS. (2021). *Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi*. Badan Pusat Statistik Indonesia.
- Calvin, C. Y., & Yuliana, L. (2016). Deteksi Ilusi Fiskal Pada Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Di Nusa Tenggara Timur Tahun 2008-2013. *Jurnal Ilmiah WIDYA*, 3(3), 152–159.
- Candra, D., Ratnawati, V., & Mutia, Y. (2019). Analisis Kemampuan Keuangan

- Pemerintah Daerah: Studi Perbandingan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau dan Kepulauan Riau. *Jurnal Ekonomi*, 27(2), 146–159.
- Dude, D. P., Kumenaung, A., & Rotinsulu, D. (2014). Analisis Kinerja Keuangan dan Fiscal Illusion Pada Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara Tahun 2003-2012. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 14(2), 29–43.
- Dumairy. (1996). *Perekonomian Indonesia*. Erlangga.
- Dyahningtyas, R., Suharsih, S., & Astuti, S. R. B. (2019). Kinerja Keuangan Daerah dan Deteksi Ilusi Fiskal Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010-2016. *Jurnal Ekonomi-Qu*, 9(1), 119–130. <https://doi.org/10.35448/jequ.v9i1.5443>
- Fretes, P. N. De. (2017). Pengaruh Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Kepulauan Yapen. *Jurnal Akuntansi & Ekonomi FE. UN PGRI Kediri*, 2(2), 1–33.
- Ghozali, I. (2009). *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS*. Universitas Diponegoro.
- Gorahe, I. A. M., Masinambow, V., & Engka, D. (2014). Analisis Belanja Daerah Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 14(3), 1–12.
- Gujarati, D. N. (2012). *Dasar-dasar ekonometrika*. Erlangga.
- Gunanto, E. Y. A., & Afifah, F. A. N. (2021). Efisiensi Ilusi Fiskal dan Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus : Kabupaten di Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 s.d. 2018). *Research Journal of Accounting and Business Management (RJABM)*, 5(1), 17–27.
- Hapsoro, D., & Yoduke, R. (2019). Fiscal Illusion Detection and Their Effect on Economic Growth in Sulawesi. *Jurnal Economia*, 15(2), 172–188. <https://doi.org/10.21831/economia.v15i2.23923>

- Hidayah, N., & Setiyawati, H. (2014). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Langsung di Propinsi Jawa Tengah. *Jurnal Akuntansi*, 18(1), 45–58.
- Ilmiyah, N. M., Saftiana, Y., & Wahyudi, T. (2020). The Empirical Analysis of Fiscal Illusion. *Accounting*, 6(6), 1033–1044.
- Iqbal, M. (2015). *Regresi Data Panel (2): Tahap Analisis*. 1–7.
- Junaidi. (2012). Asimetri pada Flypaper Effect: Bukti Empiris Pemanfaatan Dana Alokasi Umum pada Pemerintah Daerah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 14(1), 45–55. <https://doi.org/10.9744/jak.14.1.45-55>
- Kaho, J. R. (1997). *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada.
- Kolinug, F. C., Kumenaung, A. G., & Rotinsulu, D. C. (2019). Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Pemerintah Daerah Kota Manado. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 17(2). <https://doi.org/10.35794/jpekd.10248.17.2.2015>
- Machmud, M., Kawung, G., & Rompas, W. (2014). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2007-2012. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 14(2), 1–13.
- Mahmudi. (2010). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. UPP STIM YKPN.
- Mahsun, M. (2012). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. BPFPE.
- Mandagi, N., Tinangon, J. J., & Warongan, J. D. . (2016). Analisis Kinerja Keuangan Dalam Pengelolaan APBD Pada Dinas Pengelola Keuangan, Pendapatan Dan Aset (DPKPA) Kabupaten Minahasa Selatan. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 11(2), 152–162.
- Mangkoesoebroto, G. (2011). *Ekonomi Publik*. BPFPE.
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. ANDI.

- Masdjojo, G. N., & Sukartono. (2009). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah serta Analisis Flypaper Effect Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2006-2008. *Jurnal Telaah Manajemen*, 6(1), 32–50.
- Meilya, R., Akram, & Herwanti, T. (2018). Fiscal Illusion and Defining Factors of Capital Expenditure (Study on Undeveloped Areas in West Nusa Tenggara). *International Review of Management and Marketing*, 8(1), 98–106.
- Mudji, A., & Taripar, W. (2018). Analisa Produk Domestik Bruto (PDRB) Kota Malang. *PANGRIPTA Jurnal Ilmiah*, 1(1), 35–46.
- Mulyati, S., & Yusriadi. (2017). Dana Bagi hasil dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah Pada Provinsi Aceh. *Agregat*, 1(2), 211–220.
- Nahumuri, L. (2019). Esensi Dan Urgensi Pengeluaran Pemerintah Untuk Pembangunan Daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, 4(1), 1–12. <https://doi.org/10.33701/jipisk.v4i1.597>
- Ndadari, L. W., & Adi, P. H. (2008). Perilaku Asimetris Pemerintah Daerah Terhadap Transfer Pemerintah Pusat. *The 2nd National Conference UKWMS*, 6, 1–24.
- Nurabiah, N. (2018). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah yang Memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 3(1), 67–100.
- Nurhayati, N. (2017). Analisis Deteksi Fiscal illusion dengan Pendekatan Revenue Enhancement Pada Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah III Cirebon). *Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi*, 3(2), 109–119.
- Onyango, P., & Delewa. (2020). Fiscal Illusion as an Incentive for Local Government Public Expenditure Efficiency: The Influence of Community Sensitization. *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, 7(4), 341–358. <https://doi.org/10.22437/ppd.v7i4.8564>

- Pradnyana, G. A., & Erawati, N. M. A. (2016). Perbedaan Pendapatan Asli Daerah Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah di Kabupaten dan Kota Provinsi Bali. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 16(3), 1885–1911.
- Pratami, A. A. P. N. I., & Dwirandra, A. A. N. B. (2017). Pengaruh PAD, Dana Perimbangan, LPDS, dan PDRB Pada Belanja Daerah Serta Deteksi Ilusi Fiskal. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(2), 1141–1170.
- Praza, E. I. (2016). Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Alokasi Belanja Modal di Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, 4(1), 25–36. <https://doi.org/10.22437/ppd.v4i1.3530>
- Rahman, A. J., Soelistyo, A., & Hadi, S. (2016). Pengaruh Investasi, Pengeluaran Pemerintah Dan Tenaga Kerja Terhadap Pdrb Kabupaten/Kota Di Propinsi Banten Tahun 2010-2014. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 14(2), 112–121.
- Simarmata, J. (2018). Perspektif Kebijakan Daerah dalam Konteks UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan Terkait. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 12(2), 1–34.
- Supriyadi, Armandelis, & Rahmadi, S. (2013). Analisis Desentralisasi Fiskal di Kabupaten Bungo. *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, 1(1), 1–10.
- Surastowo. (2019). Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintahan Kabupaten Lampung Timur. *Jurnal Simplex*, 2(3), 175–185.
- Susanti, D., Adry, M. R., & Triani, M. (2019). Pengaruh Pendapatan, Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah Terhadap Pengeluaran Pemerintah Daerah di Sumatera Barat. *Jurnal Ecosains*, 8(1), 9–18.
- Susetyo, D., Zunaidah, Z., Rohima, S., Yulianita, A., Adam, M., & Valeriani, D. (2017). Expenditure analysis of local government and regional economic development district/city of ten province in Sumatra Island Indonesia. *International Journal of Applied Business and Economic Research*, 15(3), 17–42.

- Swandewi, A. A. I. A. (2014). Pengaruh Dana Perimbangan dan Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Keserasian Anggaran dan Kesejahteraan Masyarakat Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 3(7), 356–376.
- Syamsi, D. I. (2010). *Pokok-Pokok Kebijakan, Perencanaan, Pemograman dan Penganggaran Pembangunan Tingkat Nasional dan Regional*. Rajawali.
- UGM, B. L. D. R. dan F. (1991). *Pengukuran Kemampuan Keuangan Daerah*.
- Usui, N., & Alisjahbana, A. (2003). Local Development Planning and Budgeting in Decentralized Indonesia: Update. *International Symposium on Indonesia's Decentralization Policy: Problems and Policy Directions*, 4(5), 1–35.
- Wahab, A., AuroraL, T., & Susfayetti. (2016). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Terhadap Belanja Daerah Di Kabupaten Dan Kota Provinsi Jambi. *Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja*, 1(3), 35–47.
- Zahari, M. (2016). Pengaruh Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sarolangun. *Eksis*, 7(2), 133–148.